

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

J A K A R T A

N o m o r : B- 147 /C/Cr.2/04/2019

Jakarta, 10 April 2019

S i f a t : Segera.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Optimalisasi Anggaran Tunjangan
Kinerja Pegawai Kejaksaan RI TA
2019.

KEPADA YTH :

PARA KEPALA KEJAKSAAN

TINGGI

DI

SELURUH INDONESIA

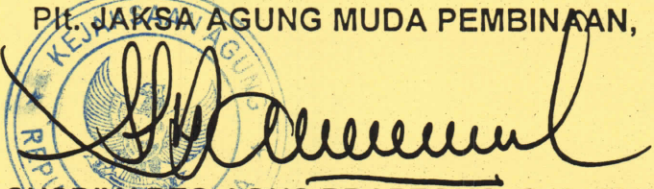
Menindaklanjuti hasil rapat antara Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 dengan pembahasan usulan kekurangan belanja pegawai Kejaksaan RI TA 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa realisasi tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI TA 2019 per tanggal 4 April 2019 yaitu :
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI adalah sebesar Rp. 256.340.842.846,- (*dua ratus lima puluh enam milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*) atau sebesar 34,3 % dari jumlah tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp. 747.968.292.000,- (*tujuh ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
 - b. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan sebesar Rp. 3.829.317.655,- (*tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*) atau sebesar 80 % dari jumlah tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.786.281.000,- (*empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
2. Bahwa usulan kekurangan tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI TA 2019 saat ini belum dapat dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, dikarenakan untuk total jumlah realisasi anggaran tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI yang masih rendah.
3. Bahwa Kementerian Keuangan RI meminta dilakukan optimalisasi anggaran tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI terlebih dahulu, sehingga usulan kekurangan tunjangan kinerja akan dapat diajukan kembali setelah realisasi anggarannya telah mendekati maksimal atau setelah Semester I TA 2019.
4. Untuk melaksanakan optimalisasi anggaran tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI TA 2019, maka diharapkan seluruh Kejaksaan Tinggi melakukan revisi anggaran tunjangan kinerja pegawai yaitu dengan melakukan revisi anggaran tunjangan kinerja pegawai dari satker-satker diwilayahnya yang realisasi anggarannya masih rendah untuk dapat dilakukan pergeseran anggaran kepada satker-satker yang anggarannya tidak mencukupi sampai dengan Semester I TA 2019.

5. Satuan kerja di daerah yang realisasi tunjangan kinerja pegawainya telah optimal dan mendesak untuk mendapat tambahan anggaran, antara lain :
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara realisasi tunjangan kinerja sebesar 92,27 %;
 - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah realisasi tunjangan kinerja sebesar 74,59 %;
 - Kejaksaan Negeri Situbondo realisasi tunjangan kinerja sebesar 81,90 %;
 - Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu realisasi tunjangan kinerja sebesar 81 %;
 - Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh realisasi tunjangan kinerja sebesar 92,61 %;
 - Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana realisasi tunjangan kinerja sebesar 79,08 %;
 - Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo realisasi tunjangan kinerja sebesar 71,42 %;
 - Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborong-Borong realisasi tunjangan kinerja sebesar 70,33 %.
6. Agar masing-masing Kejaksaan Tinggi memastikan seluruh satker terpenuhi tunjangan kinerja pegawainya sampai dengan Semester I TA 2019 yang juga meliputi tunjangan kinerja pegawai ke-13 dan THR.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk menjaga ketenangan suasana kerja pegawai, agar Saudara segera melakukan revisi anggaran tunjangan kinerja pegawai TA 2019 tersebut ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

PIH. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

SUSDIYARTO AGUS PRAPTONO, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19590815 198503 1 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Jaksa Agung RI;
 2. Yth. Wakil Jaksa Agung RI;
(1 dan 2 sebagai laporan)
 3. Yth. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
 4. Yth. Kepala Biro Keuangan;
 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
 6. Arsip.
-